

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Nina. (2020). “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol. 2(1). Hal.105-113.
- Afarahim. (2013). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragilir Hilir Periode 2005-2010”. Disertasi. Pascasarjana, Administrasi Publik, Universitas Terbuka. Jakarta.
- Alfarisi. S.H (2009). “Pengaruh Pajak Daerah. Retribusi Daerah. dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Akuntansi. Univeristas Negeri Padang.
- Anshari Setia N, Tunggul. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ayu Purnama, Wulan. (2016). “Pengaruh Komponen PAD, Leverage dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung”. Skripsi. FEB, Akuntansi, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Bank Indonesia. (2019). *Kajian Ekonomi Regional: Profil Provinsi Jawa Barat*. Tersedia: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jabar/profil/Contents/Demografi>. (diakses pada 12 November, pukul 13.27)
- Devas, Nick dkk. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fadhilah, Rizka (2019) “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah setiap Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2017” Skripsi. FE, Ekonomi Pembangunan, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

- Febriyanti, Fani dan M Fariz. (2019). “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirisan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. Vol 5(2). Hal 162-175.
- Ginting, Hamzah dkk. (2019). “Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), Hal 105-127.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*”. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Humas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2018). Retribusi Daerah. Tersedia: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi.daerah.pdf>. (diakses pada 12 November, pukul 11.26)
- Humas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Pajak Daerah*. Tersedia: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak.daerah-1.pdf>. (diakses tanggal 12 November, pukul 10.02)
- Humas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip dan Jenis*. Tersedia: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>. (diakses pada 13 November, Pukul 18.12).
- Jefriando, Maikel. (2017). *10 Daerah dengan Ekonomi Terbesar di RI*. Tersedia: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3496150/ini-10-daerah-dengan-ekonomi-terbesar-di-ri> (diakses pada 28 Oktober, pukul 09.27)
- Kaho, Josef R. (2017). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kurniawan, Panca dan Agus P. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lutfita N, Rizka. (2016) "Pengaruh Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah". *Journal Of Accounting*. Vol 2(2).
- Mukarramah. H. (2017) "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Ekonomi Pembangunan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Pandiangan, Liberty. (2014). *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf (diakses pada 12 November, pukul 10.02)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf (diakses pada 12 November, pukul 11.26)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-55-tahun-2005-tentang-dana-perimbangan/--233-268-PP55_2005.pdf (diakses pada 13 November, pukul 18.11)
- Puspita A, Putri (2018) "Analisis PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat" *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri*. Vol 3(1) Hal. 80-96.
- Rina Adriani, Neneng dan Nisa Noor W. (2018) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada

Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006-2015". *Jurnal Akuntansi*. Vol 3(1). Hal 30-39.

Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suryani, Irma. (2019) "Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Setiap /Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018" *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 11(2) Hal. 38-46.

TI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016). Dana Alokasi Umum. Tersedia:[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1776#:~:text=Dana%20Alokasi%20Umum%20\(DAU\)%20merupakan,daerah%20dalam%20rangka%20pelaksanaan%20desentralisasi](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1776#:~:text=Dana%20Alokasi%20Umum%20(DAU)%20merupakan,daerah%20dalam%20rangka%20pelaksanaan%20desentralisasi). (diakses pada 13 November, pukul 19.42).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2033%20tahun,Hasil%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah>. (diakses pada 13 November, pukul 18.22).